

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KUDUS**

#### **3.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 9 Kecamatan, berdasarkan keadaan per Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terdiri dari Kepala Kantor, Sub bagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak & Penilai PBB.

Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Kudus per 01 Januari 2012 s.d. Desember 2012 berjumlah 82 orang yang terdiri dari Eselon III, Eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai PBB, Account Representative, Pelaksana dengan golongan II, III, IV dan pendidikannya meliputi lulusan SD, SLTA, Program D1, D3, D4, S1 dan S2.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus adalah gedung kantor (terdiri dari 1 gedung kantor, gedung TPT, gedung eks. KP PBB Kudus, gedung eks. KP4 Mejobo), kendaraan dinas, jaringan sistem informasi data, sarana peribadatan dan sarana olah raga. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mencakup Kabupaten Kudus yang terbagi 9 Kecamatan.

### **3.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **3.2.1. Tugas dan Fungsi**

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 mempunyai tugas : Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi;
- k. Pembetulan ketetapan pajak;
- l. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

### 3.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada pasal 60, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama terdiri dari :

#### 1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di KPP Pratama Kudus.

2. Sub bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di KPP Pratama Kudus.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, administrasi dokumen perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan registrasi Wajib Pajak.

5. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan serta penyimpanan dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengawasan pelaksanaan, dan administrasi pemeriksaan perpajakan, melakukan pemantauan manajemen resiko dan pengendalian internal, pengawasan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjutnya.



#### 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan penggalan potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi pajak.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### 3.3. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.

3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

### **3.4. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pajak**

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama berusaha untuk menjadi aparat yang *accountable*, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Sesuai peran strategis pajak adalah sebagai salah satu penggerak proses pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengumpul/pemungut dan pengadministrasian pajak mempunyai peranan yang sangat penting, karena tingkat keberhasilan pemenuhan target penerimaan Pajak akan sangat berpengaruh bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Apalagi dimasa sekarang ini bahwa Pajak merupakan pilar ekonomi dan pembangunan negara.

### **3.5. Sumber Penerimaan Pajak**

Beberapa sumber daya yang menunjang penerimaan pajak antara lain potensi penerimaan pajak hasil tembakau (perusahaan rokok), percetakan, perdagangan, dan jasa yang mendominasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Selain itu juga ditunjang Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas-tugas KPP Pratama Kudus dengan berbagai macam latar belakang pendidikan.

### **3.6. Wilayah Kerja**

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terbagi dalam 9 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Kota.
- b. Kecamatan Bae.
- c. Kecamatan Kaliwungu.
- d. Kecamatan Gebog.
- e. Kecamatan Jati.
- f. Kecamatan Dawe.
- g. Kecamatan Undaan.
- h. Kecamatan Mejobo.
- i. Kecamatan Jekulo.

### **3.7. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus keadaan per 31 Desember 2012 secara keseluruhan mencapai 82 orang, yang terbagi dalam unit eselon/jabatan sebagai berikut :

a. Eselon III	= 1 orang
b. Eselon IV	= 9 orang
c. Fungsional Pemeriksa Pajak	= 11 orang
d. Fungsional Penilai PBB	= 1 orang
e. Account Representative	= 24 orang
f. Pelaksana	= 36 orang

Jumlah Pegawai Yang ada pada masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor	= 1 orang
b. Subbagian Umum	= 8 orang
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi	= 7 orang
d. Seksi Pelayanan	= 12 orang
e. Seksi Penagihan	= 4 orang
f. Seksi Pemeriksaan	= 2 orang
g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	= 6 orang
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	= 10 orang
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	= 10 orang
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	= 10 orang
k. Fungsional Pemeriksa Pajak	= 11 orang
l. Fungsional Penilai PBB	= 1 orang



### **3.8. Sarana dan Prasarana**

#### **3.8.1. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Kudus berdiri diatas lahan dengan luas tanah lebih kurang 3.139 m<sup>2</sup>. Bangunan gedung kantor terdiri dari 2 unit (masing-masing 2 lantai), peruntukannya 1 unit untuk ruang administrasi dan 1 unit ruang TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dan Aula. KPP Pratama Kudus terletak di Jalan Niti Semito Kudus, masuk dalam wilayah Kecamatan Kota. Termasuk daerah strategis karena letaknya dekat dengan pusat kota Kudus dan dilalui oleh jalur angkutan kota, sehingga mempermudah bagi para wajib pajak untuk mencapainya.

#### **3.8.2. Kendaraan Dinas**

operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ada 6 buah Mobil, terdiri dari 1 Toyota Kijang Innova tahun 2011, 1 Nissan Grand Livina tahun 2008, 2 Suzuki APV tahun 2006, 1 Panther tahun 2005, 1 Kijang tahun 1999, dan 9 buah sepeda motor. Kendaraan dinas ini dipergunakan untuk menunjang mobilitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, meskipun banyak diantaranya sudah berusia lebih dari 5 tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.

#### **3.8.3. Jaringan Sistem Informasi**

Data telah terpasang dengan menggunakan system intranet dan LAN (Local Area Network). Jaringan Sistem Informasi ini diadakan guna menunjang tugas-tugas kedinasan dan juga untuk meningkatkan kinerja dan performa Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Jaringan Sistem Informasi ini ditunjang oleh perangkat komputer yang terdiri dari : Server, PC , UPS, Modem, Printer dsb. serta didukung oleh perangkat lunak (software) yang memadai.

### **3.9. Aspek Eksternal**

Hubungan antar instansi yaitu antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus serta antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan Instansi Vertikal lainnya selama ini telah terjalin dengan baik dan akan terus ditingkatkan kerjasamanya. Begitu juga hubungan intern dan antar instansi di Kementerian Keuangan yang ada di Kabupaten Kudus.

Potensi wilayah Kabupaten Kudus sangat baik. Untuk wilayah Kabupaten Kudus terdapat beberapa industri rokok yang cukup potensial, industri kertas, percetakan, elektronik dan sebagainya termasuk sentra-sentra perdagangan.

Kondisi lingkungan cukup menunjang untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi WP karena tersedianya sarana dan prasarana transportasi, juga secara geografis tidak banyak menimbulkan kesulitan untuk pelaksanaannya.

### **3.10. Rencana Strategik dan Penetapan Kinerja**

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus berpandangan jauh ke depan, berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesempurnaan yang dicita-citakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan negara.

#### 3.10.1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Direktorat Jenderal Pajak maka, dibentuklah Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

*”Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.*

Visi Direktorat Jenderal Pajak yang dinyatakan di sini menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. Suatu gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

### 3.10.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi, misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

*”Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.*

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak pedoman pada nilai-nilai yang diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. *Integritas* – Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. *Profesionalisme* – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.



- c. *Sinergi* – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.
- d. *Pelayanan* – Memiliki layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. *Kesempurnaan* – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia di KPP Pratama Kudus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

### 3.10.3. Tujuan

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut dan dengan memperhatikan faktor faktor kunci keberhasilan yang dimiliki, maka KPP Pratama Kudus telah menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Kudus.
- b. Peningkatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.
- c. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
- e. Peningkatan profesionalisme dan integritas SDM.



#### 3.10.4. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 adalah :

- a. Penerimaan pajak yang optimal
- b. Tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan
- c. Tingkat kepatuhan WP yang tinggi
- d. Peningkatan kualitas pelayanan
- e. Peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan
- f. Peningkatan penggalian potensi berbasis mapping dan profil
- g. Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi
- h. Optimalisasi pelaksanaan penagihan
- i. Peningkatan efektivitas pemeriksaan
- j. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, SDM, dan Sistem Informasi
- k. Optimalisasi pengelolaan penggunaan anggaran

#### 3.10.5. Kebijakan

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Pelayanan Pajak Kudus, maka kebijakan yang dipergunakan adalah

- a. Pencapaian Rencana Penerimaan.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- c. Membangun Masyarakat Yang Sadar Dan Peduli Pajak.

#### 3.10.6. Program Instansi

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus yang dilaksanakan untuk menunjang Kebijakan adalah :

1. Penggalian potensi dan pengawasan WP
2. Pemberlakuan jam pelayanan sesuai ketentuan
3. Menyediakan Help Desk
4. Menyediakan Kotak Saran
5. Dilakukan pendataan NPWP berbasis data properti PER-116
6. Menyediakan Drop Box di tempat strategis
7. Membuka ruangan khusus penerimaan SPT Tahunan
8. Mengadakan kegiatan jemput bola SPT Tahunan
9. Mengadakan Pekan Panutan
10. Penelitian atas SPT Tahunan WP
11. Ekualisasi atas PPh dan PPN
12. Penelitian dan tindak lanjut data Alket
13. Pelayanan kepada WP sesuai standar dan waktu pelayanan

14. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan
15. Visit ke Wajib Pajak
16. Analisa Laporan Keuangan
17. Analisa Data Alket
18. Pertukaran data/update KLU WP
19. Kanvasing WP
20. Pengamatan potensi WP
21. Pendataan SISMIOP
22. Optimalisasi data berbasis SISMIOP
23. Tindakan Penagihan
24. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan
25. *In House Training* Fungsional Pemeriksaan dan Seksi Pemeriksaan
26. Penyelesaian SP2
27. Tindaklanjut atas pencairan (fresh money) terhadap hasil pemeriksaan
28. Usulan pemeriksaan khusus
29. Pembinaan pegawai
30. Menindaklanjuti temuan Ditjen dan BPK
31. *In House Training* dan *Internalisasi Corporate Value*
32. Pelaksanaan penyerapan anggaran rutin operasional kantor dan pemeliharaan perkantoran

#### 3.10.7. Penetapan Kinerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dipercaya oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I, untuk mengemban tugas mengamankan penerimaan sebesar yang telah

ditentukan. Dalam usaha untuk mengamankan penerimaan, KPP Pratama Kudus masih memfokuskan peningkatan penerimaan dari Wajib Pajak Hasil Tembakau yang memang mendominasi penerimaan KPP Pratama Kudus. Selain itu KPP Pratama Kudus masih tetap berusaha untuk menggali potensi lain yang ada di wilayah KPP Pratama Kudus, seperti percetakan, perdagangan, industri mebel, sarang burung walet dan juga kegiatan membangun sendiri.

*Grand Strategi* yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kudus adalah Konsolidasi yang dilakukan dengan melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia untuk membentuk citra Direktorat Jenderal Pajak. Konsolidasi terbagi menjadi dua bagian :

1. Ke dalam
  - a. Melalui penguasaan teknis perpajakan, administrasi dan pelayanan.
  - b. In House Training, Internalisasi Corporate Value dan mengefektifkan pelaksanaan Forum AR, Forum Fungsional, Pengajian Rutin Bulanan dan Hari Krida.
  - c. Pendayagunaan sarana dan prasarana.
  - d. Evaluasi pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui rapat pembinaan.
2. Ke luar

Melakukan Koordinasi KPKN, Pemerintah Daerah Kabupaten, Instansi lainnya, serta berbagai organisasi profesi.